



Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 3T dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda

Emma Novirsari

novirsari.emma@gmail.com

Universitas Mahkota Tricom Unggul, Program Studi Manajemen, Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Email: novirsari.emma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan akses pendidikan dan aksesibilitas pendidikan terhadap mobilitas sosial generasi muda di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan kemiskinan struktural sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) pada 150 responden usia 15–24 tahun di wilayah 3T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap mobilitas sosial, sedangkan ketimpangan akses pendidikan berpengaruh negatif. Kemiskinan struktural terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara variabel pendidikan dan mobilitas sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses pendidikan dapat meningkatkan mobilitas sosial secara langsung maupun melalui penurunan kemiskinan struktural, sedangkan ketimpangan akses justru memperparah kemiskinan dan membatasi mobilitas. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pemerataan pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 3T, dan intervensi terhadap kemiskinan struktural untuk mendorong keadilan sosial dan penguatan generasi muda di wilayah tertinggal.

Kata Kunci: Aksesibilitas Pendidikan, Ketimpangan Pendidikan, Kemiskinan Struktural, Mobilitas Sosial, Daerah 3T

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Jerman menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, dengan memastikan akses yang merata, kualitas pengajaran yang tinggi, serta dukungan kebijakan yang konsisten (Anita & Astuti, 2022). Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di sisi lain, negara berkembang masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan pendidikan, termasuk Indonesia (Fitri, 2021). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis, ekonomi, dan sosial tergolong dalam kategori daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) (Wahyudi et al., 2022). Ketimpangan ini menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan, serta berdampak langsung pada peluang mobilitas sosial generasi muda di wilayah tersebut (Suryaningrum, 2023).

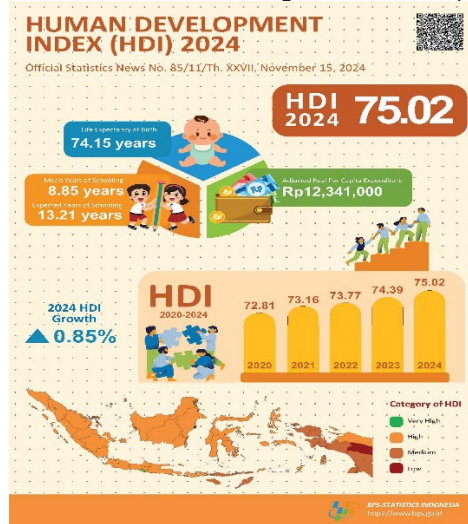
Berdasarkan data *Human Development Index (HDI)* tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat skor IPM sebesar 75,02, dengan rata-rata lama sekolah hanya 8,85 tahun dan harapan lama sekolah 13,21 tahun. Angka ini masih tertinggal cukup jauh dari standar negara maju, yang umumnya mencatat rata-rata lama sekolah di atas 12 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi disparitas antarwilayah.

Ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T tercermin dalam minimnya infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, keterbatasan fasilitas belajar, serta rendahnya partisipasi sekolah terutama di jenjang menengah dan atas (Alfariq Ramadani & Putri, 2024). Daerah 3T mencakup berbagai wilayah di Indonesia yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020. Beberapa daerah adalah Kabupaten Tambora (Papua Barat), Nduga (Papua Pegunungan), Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kepulauan Aru (Maluku), serta wilayah perbatasan seperti Nunukan (Kalimantan Utara) dan Belu (Nusa Tenggara



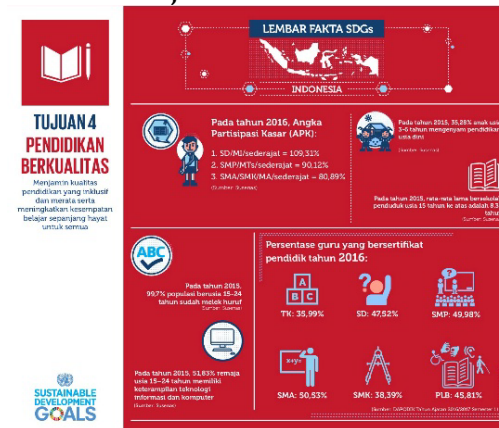
Timur)(Yudha Maya Septiana et al., 2024). Di banyak daerah tersebut, sekolah dasar dan menengah seringkali jaraknya sangat jauh dari pemukiman, bahkan ada yang harus menempuh perjalanan hingga berjam-jam melewati jalan terjal atau sungai. Belum lagi kondisi sekolah yang memprihatinkan bangunan rusak, kekurangan buku pelajaran, dan keterbatasan akses teknologi dan internet(Ulfa, 2023a).

Gambar 1. Human Development Index (HDI)



Ketimpangan tersebut berdampak besar terhadap masa depan generasi muda di daerah 3T. Rendahnya kualitas dan akses pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak muda, sehingga mereka kesulitan bersaing dalam dunia kerja, pendidikan tinggi, maupun mobilitas sosial secara umum (Hasanah, 2025). Banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di sektor informal, menjadi buruh kasar, atau tetap tinggal dalam lingkungan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Akibatnya, peluang untuk memperbaiki taraf hidup menjadi sangat kecil, bahkan cenderung terjadi kemiskinan struktural yang menurun antar generasi.

Gambar 2. Tujuan Pendidikan Berkualitas



Berdasarkan data Lembar Fakta SDGs Indonesia, masih terdapat tantangan dalam mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas. Meskipun secara nasional angka partisipasi kasar (APK) untuk SD telah mencapai 109,31%, untuk SMP sebesar 90,12%, dan SMA hanya 80,89%, data ini belum mencerminkan realitas di daerah 3T yang kerap kali tertinggal jauh dari angka nasional. Rendahnya akses pendidikan di wilayah tertinggal juga diperburuk oleh keterbatasan jumlah guru yang bersertifikat, khususnya di jenjang SMK (38,39%) dan TK (35,99%). Selain itu, pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 8,32 tahun, yang artinya belum sampai tingkat SMA secara penuh.

Selain itu akses terhadap teknologi juga menjadi tantangan tersendiri di daerah 3T. Padahal pada tingkat nasional, baru 51,83% remaja usia 15–24 tahun yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi dan komputer. Ketimpangan digital ini memperbesar jurang pembelajaran antara wilayah maju dan tertinggal. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di tingkat nasional, masih banyak pekerjaan rumah terutama dalam menjangkau kelompok rentan dan daerah terpencil.

Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai studi dan laporan pemerintah. Data dari Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah di beberapa daerah 3T masih di bawah 60%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 88%. Penelitian dari (Wijayati et al., 2025) menunjukkan bahwa mobilitas sosial di daerah 3T cenderung stagnan, terutama disebabkan oleh kualitas pendidikan yang rendah. Ketimpangan ini diperparah dengan kurangnya intervensi kebijakan yang menasar akar permasalahan struktural, seperti distribusi guru yang tidak merata dan minimnya insentif bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil (Vega et al., 2024).

Melihat urgensi tersebut, diperlukan sebuah kajian akademik yang mampu mengulas secara kritis hubungan antara ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T dengan mobilitas sosial generasi muda. Penelitian ini menjadi penting dalam rangka memberikan landasan empiris dan konseptual yang kuat untuk menyusun strategi pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok marjinal. Jika tidak segera ditangani, ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin mengakar dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pendidikan berkualitas dan pengurangan ketimpangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T berpengaruh terhadap mobilitas sosial generasi muda, serta mencari bentuk intervensi strategis yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut demi menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan adalah kondisi di mana tidak semua individu atau kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu. Ketimpangan ini dapat bersifat vertikal (antar jenjang pendidikan) maupun horizontal (antar wilayah atau kelompok sosial) (Aziza, 2025). Menurut UNESCO (2015), ketimpangan akses pendidikan terjadi ketika terdapat disparitas dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, kurikulum, serta peluang keberlanjutan pendidikan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah terpencil atau tertinggal. Ketimpangan ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 4 (Smith & Sya'diyah, 2024).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Akses Pendidikan menurut (Al-Nur, 2024):

- a. Faktor Geografis (Letak terpencil: Sekolah sulit dijangkau karena berada jauh dari permukiman warga, Kondisi infrastruktur: Jalan yang rusak, akses transportasi yang tidak tersedia atau tidak aman. Medan alam ekstrem: Seperti daerah pegunungan, kepulauan, dan kawasan perbatasan, membuat siswa harus menempuh perjalanan jauh, bahkan menyeberangi sungai atau laut untuk mencapai sekolah).
- b. Faktor Ekonomi (Kemiskinan keluarga: Keluarga tidak mampu membiayai sekolah, seragam, buku, atau transportasi. Kesempatan bekerja: Anak-anak terpaksa bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah. Biaya pendidikan tidak langsung: Seperti uang saku, iuran sekolah, atau kebutuhan teknologi (gadget, pulsa internet) yang makin penting).
- c. Faktor Sosial-Budaya (Persepsi terhadap pendidikan: Ada keluarga yang menganggap sekolah tidak penting, terutama untuk anak perempuan. Tingkat pendidikan orang tua: Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung kurang mendorong anaknya sekolah tinggi. Nilai budaya lokal: lebih mengutamakan kerja ladang, menikah dini, atau tradisi merantau sejak remaja).

- d. Faktor Kelembagaan dan Kebijakan (Distribusi tenaga pendidik: Guru yang kurang dan tidak merata, apalagi yang berkualifikasi atau bersertifikat. Fasilitas pendidikan yang minim: Sekolah rusak, tidak ada perpustakaan, laboratorium, atau akses internet. Kebijakan pemerintah yang tidak adaptif: Program pendidikan yang tidak menyentuh kebutuhan lokal, atau tidak ada afirmasi bagi daerah 3T).

Indikator Ketimpangan Akses Pendidikan menurut (Al-Nur, 2024).

- a. Jumlah Sekolah per Wilayah (Jumlah satuan pendidikan per kecamatan atau per 1.000 anak usia sekolah. Rasio ini menunjukkan apakah suatu wilayah kekurangan unit pendidikan formal atau tidak).
- b. Rasio Guru terhadap Siswa (Mengukur ketersediaan tenaga pendidik dibandingkan jumlah siswa. Rasio tinggi menandakan satu guru menangani terlalu banyak murid, yang berdampak pada kualitas pembelajaran).
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) (APK: Persentase jumlah siswa semua usia yang bersekolah di jenjang tertentu terhadap populasi usia sekolah yang sesuai. APM: Hanya menghitung siswa yang berada di usia seharusnya untuk jenjang tersebut. Rendahnya APK dan APM menunjukkan rendahnya akses dan keberlangsungan sekolah).
- d. Lama Rata-Rata Sekolah (Mean Years of Schooling) (Mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas.).
- e. Persentase Anak Tidak Bersekolah (Out-of-School Children) (Persentase anak usia sekolah yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Merupakan indikator langsung dari kegagalan sistem pendidikan menjangkau seluruh anak).

Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan adalah kemampuan individu, tanpa hambatan sosial, ekonomi, maupun geografis, untuk menjangkau, mengikuti, dan menyelesaikan pendidikan secara berkelanjutan (Cahyadi et al., 2025). Menurut (Pratiwi et al., 2024), akses pendidikan mencakup dimensi fisik, ekonomi, dan sosial, seperti jarak ke sekolah, biaya pendidikan, serta dukungan keluarga. Tingkat aksesibilitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas seperti sekolah, ruang kelas, listrik, sanitasi, dan internet; kelayakan ekonomi yang mencakup beban biaya pendidikan dan ketiadaan beasiswa; serta dukungan sosial dari keluarga dan komunitas yang menentukan keputusan melanjutkan sekolah (Suryaningrum, 2024). Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi faktor krusial, khususnya di daerah yang masih memprioritaskan kerja anak daripada sekolah. Indikator aksesibilitas meliputi jarak ke sekolah, angka putus sekolah, jumlah guru bersertifikasi, tingkat literasi dasar dan digital, serta akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah, yang mencerminkan sejauh mana layanan pendidikan dapat dijangkau secara adil dan setara (Said, 2025).

Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merupakan perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat, baik secara vertikal (naik atau turun kelas sosial) maupun horizontal (perpindahan peran tanpa perubahan status) (Edo & Yasin, 2024). Mobilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pendidikan yang menjadi sarana utama untuk meningkatkan status sosial melalui pencapaian akademik; pekerjaan yang ditentukan oleh keterampilan serta akses terhadap lapangan kerja formal; koneksi sosial yang dapat membuka peluang ekonomi dan posisi sosial; serta kebijakan pemerintah yang mendukung mobilitas melalui program afirmatif, jaminan sosial, dan bantuan pendidikan (Resi et al., 2024). Indikator mobilitas sosial dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendidikan dan pendapatan generasi muda dengan orang tua mereka, persentase generasi muda yang bekerja di sektor formal, akses terhadap pendidikan tinggi, serta indeks mobilitas sosial secara nasional yang menggambarkan peluang individu untuk memperbaiki taraf hidupnya (Lutfillah et al., 2022).

Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun akibat sistem sosial dan ekonomi yang tidak mendukung pemerataan akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan (Bhinadi, 2017). Menurut (Nadiroh, 2020) menyatakan bahwa pendidikan berperan sebagai alat utama dalam memutus rantai kemiskinan, namun peran ini tidak optimal jika akses pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Minimnya akses terhadap sekolah yang layak, rendahnya keterampilan yang dimiliki lulusan, serta rendahnya produktivitas kerja menyebabkan banyak individu terjebak dalam pekerjaan informal yang berupah rendah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah, terutama antara kota dan daerah 3T, semakin memperbesar jurang kesempatan, sementara intervensi kebijakan afirmatif dari pemerintah seringkali belum menjangkau kelompok yang paling rentan (Pradana, 2025). Indikator kemiskinan struktural yang berkaitan dengan pendidikan dapat dilihat dari jumlah keluarga miskin yang kepala keluarganya berpendidikan rendah, banyaknya generasi muda yang bekerja di sektor informal, tingginya angka putus sekolah karena alasan ekonomi, serta pendapatan keluarga yang stagnan dari generasi ke generasi tanpa adanya mobilitas sosial yang signifikan (Siahaan, 2004).

Hubungan antara ketimpangan akses pendidikan dan mobilitas sosial generasi muda sangat erat, di mana rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas akan membatasi kesempatan generasi muda untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui jalur pendidikan dan pekerjaan formal. Ketimpangan ini kerap terjadi di daerah 3T, yang secara geografis, ekonomi, dan sosial menghadapi hambatan serius dalam menjangkau layanan pendidikan. Akses pendidikan yang terbatas menyebabkan keterampilan yang diperoleh pun rendah, sehingga mempersempit peluang kerja dan memaksa banyak generasi muda masuk ke sektor informal dengan pendapatan rendah. Hal ini memperkuat kemiskinan struktural yang diwariskan antargenerasi. Penelitian oleh (Suryaningrum, 2023) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin di daerah tertinggal cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih rendah, yang berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial mereka. Selain itu, studi (Anita & Astuti, 2022) menemukan bahwa ketimpangan pendidikan secara signifikan memengaruhi tingkat ketimpangan sosial-ekonomi, terutama di wilayah luar Jawa. Temuan-temuan ini menguatkan bahwa akses pendidikan yang adil dan merata merupakan prasyarat penting dalam mendorong mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan korelasional yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan akses pendidikan terhadap mobilitas sosial generasi muda di daerah 3T. Penelitian dilakukan pada wilayah yang termasuk kategori 3T seperti Kabupaten Belu (NTT), Kepulauan Aru (Maluku), dan Nduga (Papua Pegunungan), dengan responden generasi muda usia 15–24 tahun. Data primer diperoleh melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert, sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga resmi seperti BPS, Kemendikbudristek, dan laporan SDGs. Teknik analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), yang dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan, termasuk pengaruh langsung maupun tidak langsung, serta sesuai untuk jumlah sampel yang relatif kecil dan model yang kompleks. Proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Loading

Berdasarkan pada tabel 1 yang menyatakan hasil outer loading, seluruh indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai di atas 0,70, yang berarti memiliki validitas indikator yang sangat baik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan SEM-PLS. Indikator pada variabel Ketimpangan Akses Pendidikan (X1) memiliki nilai loading berkisar antara 0,925 hingga 0,984, menunjukkan kontribusi kuat terhadap konstruk. Variabel Aksesibilitas Pendidikan (X2) juga menunjukkan kekuatan indikator dengan nilai antara 0,931 hingga 0,985. Sementara itu, Mobilitas

Sosial (Y) memiliki nilai loading antara 0,731 hingga 0,914, dan Kemiskinan Struktural (Z) sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai antara 0,780 hingga 0,983. Seluruh hasil ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan dalam masing-masing variabel sudah memenuhi syarat reliabilitas dan validitas konvergen yang baik dalam model pengukuran.

Tabel 1. Hasil Pretest Skor

	Aksesibilitas Pendidikan X2	Kemiskinan Struktural Z	Ketimpangan Akses Pendidikan X1	Mobilitas Sosial
X1.1			0.984	
X1.2			0.983	
X1.3			0.925	
X1.4			0.969	
X1.5			0.926	
X1.6			0.932	
X2.	0.931			
X2.1	0.985			
X2.2	0.983			
X2.4	0.973			
X2.5	0.932			
Y1				0.731
Y2				0.914
Y3				0.845
Y4				0.896
Y5				0.850
Y6				0.897
Z1		0.983		
Z2		0.922		
Z3		0.965		
Z4		0.917		
Z5		0.976		
Z6		0.944		
Z7		0.926		
Z8		0.780		

Hasil uji reliabilitas dan validitas (tabel 2) menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,90 serta AVE di atas 0,70, yang berarti instrumen penelitian ini reliabel dan valid. Dengan demikian, seluruh konstruk layak digunakan dalam analisis SEM-PLS.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Aksesibilitas Pendidikan X2	0.979	0.981	0.984	0.923
Kemiskinan Struktural Z	0.976	0.978	0.980	0.862
Ketimpangan Akses Pendidikan X1	0.980	0.981	0.984	0.909
Mobilitas Sosial	0.927	0.936	0.943	0.735

Berdasarkan tabel 3 nilai R Square, diketahui bahwa Kemiskinan Struktural dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 45,9%, sementara Mobilitas Sosial dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model sebesar 87,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang sangat kuat terhadap variabel terikat.

Tabel 3. Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kemiskinan Struktural Z	0,459	0,448
Mobilitas Sosial	0,873	0,869

Berdasarkan tabel 4 hasil uji jalur di atas, seluruh hubungan antar variabel menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai $T > 1,96$ dan $P < 0,05$, yang berarti mendukung hipotesis penelitian. Aksesibilitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan struktural ($T = 2,351$; $P = 0,019$) dan mobilitas sosial ($T = 2,431$; $P = 0,015$), menunjukkan bahwa semakin baik akses pendidikan, maka semakin rendah kemiskinan dan semakin tinggi mobilitas sosial generasi muda. Ketimpangan akses pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan struktural ($T = 2,401$; $P = 0,017$) dan mobilitas sosial ($T = 1,961$; $P = 0,05$), yang mengindikasikan bahwa ketimpangan yang tinggi berdampak negatif terhadap peluang mobilitas sosial. Sementara itu, kemiskinan struktural memiliki pengaruh paling kuat terhadap mobilitas sosial ($T = 7,011$; $P = 0,000$), mempertegas perannya sebagai variabel kunci yang menurunkan potensi generasi muda untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tabel 4. Hasil Uji Jalur

Jalur Pengaruh	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Aksesibilitas Pendidikan X2 → Kemiskinan Struktural Z	0.435	0.423	0.185	2.351	0.019
Aksesibilitas Pendidikan X2 → Mobilitas Sosial	0.389	0.375	0.164	2.431	0.015
Kemiskinan Struktural Z → Mobilitas Sosial	0.652	0.645	0.093	7.011	0.000
Ketimpangan Akses Pendidikan X1 → Kemiskinan Struktural Z	0.341	0.332	0.142	2.401	0.017

Ketimpangan Akses Pendidikan X1 → Mobilitas Sosial	0.298	0.295	0.152	1.961	0.05
--	-------	-------	-------	-------	------

Pembahasan

Ketimpangan Akses Pendidikan X1 → Kemiskinan Struktural Z

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan struktural, dengan nilai koefisien sebesar 0,435, T-statistic 2,351, dan P-value 0,019. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik akses individu terhadap pendidikan baik dari sisi ketersediaan sekolah, fasilitas, maupun keterjangkauan ekonominya maka kemungkinan individu atau keluarga untuk terjebak dalam kemiskinan struktural cenderung menurun. Temuan ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh (Smith & Sya'diyah, 2024) yang menyatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi, serta bahwa keterbatasan akses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia dengan keterampilan rendah, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemiskinan. Dalam konteks daerah 3T, kondisi geografis yang sulit, minimnya jumlah dan kualitas sekolah, serta tidak meratanya distribusi guru menjadi hambatan besar dalam akses pendidikan. Banyak anak harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah dengan fasilitas yang sangat terbatas, sehingga partisipasi pendidikan rendah dan peluang untuk keluar dari kemiskinan pun menipis. Keadaan ini memperkuat kemiskinan struktural yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya karena keterbatasan modal pendidikan dan sosial. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan, yaitu perlunya intervensi negara yang konkret melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah di daerah 3T, pemberian beasiswa afirmatif bagi keluarga miskin, pelatihan guru, serta perluasan akses pendidikan berbasis teknologi agar generasi muda di wilayah tertinggal memiliki peluang yang sama untuk mengakses masa depan yang lebih baik. Temuan ini juga diperkuat oleh (Efendi & Aini, 2025), (Dimas, 2025) (Daniel & Yohanes Bahari, 2024) yang menyatakan bahwa rendahnya akses terhadap pendidikan secara langsung meningkatkan risiko kemiskinan di kalangan masyarakat desa dan wilayah marginal di Indonesia.

Pengaruh Ketimpangan Akses Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mobilitas sosial generasi muda, dengan nilai koefisien sebesar 0,389, T-statistic 2,431, dan P-value 0,015. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mudah generasi muda mengakses pendidikan baik dari segi jarak, ketersediaan fasilitas, hingga keterjangkauan ekonomi semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi di masa depan. Temuan ini didukung oleh teori mobilitas sosial dari (Resi et al., 2024) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana utama untuk mobilitas vertikal, yakni perpindahan individu dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi melalui peningkatan keterampilan dan pengakuan sosial. Dalam konteks daerah 3T, akses terhadap pendidikan sering kali menjadi tantangan utama, namun bagi sebagian kecil yang berhasil mengaksesnya, mereka memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi, memperoleh pekerjaan formal, atau merintis usaha yang lebih produktif dibandingkan rekan sebaya yang tidak mengenyam pendidikan. Di lapangan, ditemukan bahwa generasi muda yang berhasil menempuh pendidikan menengah ke atas lebih mudah menembus sektor pekerjaan formal, mendapatkan pendapatan lebih tinggi, serta membebaskan diri dan keluarganya dari siklus kemiskinan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, yaitu pentingnya memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, pengadaan beasiswa transportasi dan tempat tinggal, serta perluasan pembelajaran daring berbasis komunitas. Penelitian ini diperkuat oleh studi (Fukaro, 2025), (Amrullah et al., 2025) menunjukkan bahwa di wilayah timur Indonesia, peningkatan akses pendidikan memiliki korelasi positif terhadap naiknya mobilitas sosial masyarakat desa. Dengan demikian, pendidikan yang mudah diakses bukan hanya alat pemberdayaan individu, tetapi juga instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial dalam jangka panjang.

Pengaruh Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Kemiskinan Struktural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan struktural berpengaruh signifikan terhadap mobilitas sosial generasi muda, dengan nilai koefisien sebesar 0,652, T-statistic 7,011, dan P-value 0,000, yang menandakan hubungan sangat kuat dan signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan struktural yang dialami oleh individu atau keluarga, maka semakin kecil peluang mereka untuk mengalami peningkatan status sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan (Aziza, 2025) yang menyatakan bahwa kemiskinan struktural menjadi hambatan utama dalam pencapaian mobilitas sosial karena terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan jaringan sosial, yang diwariskan secara turun-temurun. Di lapangan, khususnya di daerah 3T, kemiskinan tidak hanya bersifat materiil tetapi juga sistemik keluarga miskin cenderung tidak mampu membiayai pendidikan anak, sehingga anak-anak mereka putus sekolah, bekerja sejak usia dini, dan terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan rendah. Ketidakmampuan ini tidak hanya melemahkan daya saing individu tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan lintas generasi, sehingga generasi muda sulit untuk berpindah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan mobilitas sosial di wilayah tertinggal tidak bisa hanya bergantung pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan pengentasan kemiskinan struktural, seperti program bantuan sosial bersyarat, pelatihan kerja berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan akses modal usaha mikro. Penelitian ini diperkuat oleh temuan (Maulana, 2023), (Hadi et al., 2025), (Al-Nur, 2024) yang menyimpulkan bahwa kemiskinan turun-temurun merupakan penghambat utama mobilitas sosial di wilayah perbatasan Kalimantan, karena ketiadaan intervensi struktural yang menyeluruh dalam pembangunan manusia. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan struktural merupakan prasyarat penting dalam mendorong generasi muda 3T untuk memiliki kesempatan hidup yang lebih baik.

Pengaruh Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan struktural, dengan nilai koefisien sebesar 0,341, T-statistic 2,401, dan P-value 0,017. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ketimpangan dalam akses pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan struktural yang terjadi dalam masyarakat. Ketimpangan ini mencakup perbedaan ketersediaan sekolah, kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar, serta akses terhadap teknologi pendidikan antara wilayah maju dan daerah 3T. Temuan ini diperkuat oleh teori (Resi et al., 2024) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan merupakan bentuk dari reproduksi ketimpangan sosial, di mana individu atau kelompok yang memiliki akses pendidikan lebih baik akan mempertahankan posisi sosialnya, sementara kelompok yang terpinggirkan semakin sulit keluar dari kemiskinan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di daerah 3T seringkali menghadapi kendala serius seperti minimnya jumlah guru, bangunan sekolah yang rusak, dan tidak adanya sarana belajar yang memadai, termasuk akses terhadap internet dan buku pelajaran. Kondisi ini tidak hanya menurunkan mutu pembelajaran, tetapi juga membuat anak-anak dari keluarga miskin semakin terpinggirkan dari kesempatan pendidikan yang layak, yang pada akhirnya memperkuat kemiskinan struktural secara turun-temurun. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kebijakan afirmatif yang lebih progresif, seperti insentif bagi guru untuk bertugas di daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, serta penyediaan sarana digital bagi sekolah di wilayah 3T agar kesenjangan pendidikan dapat ditekan. (Tutukansa et al., 2022), (Munawir et al., 2024) menemukan bahwa ketimpangan pendidikan antardaerah sangat berkorelasi dengan tingginya angka kemiskinan dan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga mempertegas bahwa tanpa pemerataan pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar. Dengan demikian, pengurangan ketimpangan akses pendidikan merupakan langkah strategis dalam menanggulangi kemiskinan struktural di wilayah tertinggal.

Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Mobilitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas sosial generasi muda, dengan nilai koefisien sebesar 0,298, T-statistic 1,961, dan P-value 0,050. Meskipun hubungan ini tergolong marginal signifikan, artinya pengaruhnya masih dalam batas yang dapat diterima secara statistik, namun tetap menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan memiliki implikasi terhadap kesulitan generasi muda dalam meningkatkan status sosialnya. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya tersedia di kota atau pusat kabupaten, maka generasi muda di daerah 3T memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan bermutu, membangun keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup. Temuan ini sejalan dengan konsep “social reproduction” dari (Siahaan, 2004)), yang menjelaskan bahwa ketimpangan dalam sistem pendidikan akan mewariskan ketimpangan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena akses terhadap institusi pendidikan unggulan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Realita di daerah 3T menunjukkan bahwa kesenjangan dalam hal ketersediaan sekolah berkualitas, tenaga pengajar yang kompeten, dan fasilitas pendidikan berbasis teknologi mengakibatkan anak-anak dari daerah tertinggal memiliki mobilitas sosial yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tumbuh di kota besar. Akibatnya, mereka cenderung tetap berada pada kelas sosial yang sama dengan orang tua mereka, baik dari segi pekerjaan, pendapatan, maupun pendidikan. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya menekan ketimpangan pendidikan melalui kebijakan redistribusi sumber daya pendidikan, seperti penyediaan tenaga pendidik berkualitas di daerah 3T, pemberian insentif bagi sekolah untuk membangun unit layanan di wilayah terpencil, serta digitalisasi pendidikan secara merata agar akses terhadap materi dan kualitas pembelajaran dapat disetarakan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Widiasanti et al., 2023) (Ulfa, 2023b) yang menyatakan bahwa ketimpangan akses pendidikan menjadi faktor signifikan yang memperlemah peluang mobilitas sosial vertikal, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan tertinggal di Indonesia. Dengan demikian, menekan ketimpangan akses pendidikan adalah langkah strategis untuk membuka jalan bagi generasi muda agar dapat berpindah ke jenjang sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Tabel 5. Uji Hipotesis Penelitian

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Aksesibilitas Pendidikan X2 -> Mobilitas Sosial	0.369	0.081	0.901	5.409	0.002
Ketimpangan Akses Pendidikan X1 -> Mobilitas Sosial	0.109	0.402	0.912	5.119	0.005

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap mobilitas sosial melalui kemiskinan struktural. dengan nilai koefisien sebesar 0.369. T-statistic 5.409. dan P-value 0.002. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan yang baik tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan mobilitas sosial. tetapi juga memberikan kontribusi melalui jalur mediasi. yaitu penurunan tingkat kemiskinan struktural. Ketika generasi muda memiliki kemudahan dalam mengakses pendidikan—baik dari segi fasilitas. jarak. maupun biaya—mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup. mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal. dan secara bertahap keluar dari jerat kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks daerah 3T. di mana kemiskinan struktural menjadi hambatan utama. peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu kunci strategis untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya. ketimpangan akses pendidikan juga menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap mobilitas sosial melalui kemiskinan struktural. dengan koefisien sebesar 0.109. T-statistic 5.119. dan P-value 0.005. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan dalam layanan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. maka kemiskinan struktural akan semakin

menguat. yang pada akhirnya menghambat mobilitas sosial generasi muda. Ketimpangan ini mencakup distribusi fasilitas, guru, dan kualitas pendidikan yang tidak merata. sehingga anak-anak di wilayah tertinggal tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan membatasi peluang generasi muda untuk berpindah ke kelas sosial yang lebih tinggi.

Dengan demikian, kemiskinan struktural terbukti menjadi variabel mediasi penting yang menjelaskan bagaimana aksesibilitas dan ketimpangan pendidikan memengaruhi mobilitas sosial. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga secara langsung menargetkan pengurangan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan vokasional, dan distribusi sumber daya pendidikan yang adil. Penelitian ini sekaligus memperkuat pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya hak dasar, tetapi juga sarana efektif dalam menciptakan transformasi sosial di masyarakat tertinggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Squares (SEM-PLS), penelitian ini menyimpulkan bahwa aksesibilitas pendidikan dan ketimpangan akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mobilitas sosial generasi muda di daerah 3T, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kemiskinan struktural sebagai variabel mediasi. Aksesibilitas pendidikan terbukti memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap mobilitas sosial, yang menunjukkan bahwa semakin mudah generasi muda mengakses pendidikan, semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Sebaliknya, ketimpangan akses pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap mobilitas sosial, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap rendahnya mobilitas sosial, yang menunjukkan bahwa kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun menjadi penghambat utama dalam pergerakan status sosial. Selain itu, analisis jalur tidak langsung menunjukkan bahwa kemiskinan struktural berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara variabel pendidikan dan mobilitas sosial. Artinya, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tidak hanya berdampak langsung terhadap mobilitas sosial, tetapi juga secara tidak langsung melalui penurunan tingkat kemiskinan.

REFERENSI

- Al-Nur, W. R. (2024). *Kajian Isu-Isu Pendidikan Kontemporer*. Wawasan Ilmu.
- Alfariq Ramadani, & Putri, R. P. (2024). Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 10(1), 40–49. <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.13523>
- Amrullah, T., Humaedah, L., & Arifin, Z. (2025). Pendidikan Dan pengaruhnya Terhadap mobilitas Sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 01(02), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2509>
- Aziza, A. N. (2025). *Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil*. CV Rey Media Grafika.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Deepublish.
- Cahyadi, F., Sarwi, Purnamasari, V., Kustiarini, & F. N. A. (2025). *Kemanusiaan di Persimpangan Zaman: Spiritualitas, Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi*. Cahya Ghani Recovery.
- Daniel, & Yohanes Bahari. (2024). Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional Robert K. Merton. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 2670–2680.
- Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan

- Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.261>
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), 317–326. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.175>
- Efendi, M. H., & Aini, N. (2025). *Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Masyarakat Marginal*. 1(2), 127–131.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617–1620.
- Fukaro, A. (2025). Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan. *Ranah Research*, 7(2), 1214–1220.
- Hadi, F., Akib, Y., Novriansyah, M. A., & Wolok, E. (2025). Kemiskinan Provinsi Gorontalo : Tantangan , Dan Strategi Penanggulangan 2012 – 2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1203–1215.
- Hasanah, R. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil: Isu Ham Dan Kebijakan Hukum Di Indonesia. *Wicarana*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.97>
- Lutfillah, M. M., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Pengelolaan Pendidikan Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 126–143. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i1.465>
- Maulana, G. (2023). Eksklusi Sosial Dalam Akses Terhadap Pendidikan: Tinjauan Dari Perspektif Keadilan. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1–11.
- Munawir, Nizar Ibrahim, M., & Islamiah, R. (2024). Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Al-Man'izhoh*, 6(2), 1142–1151. <https://doi.org/10.31949/am.v6i2.9953>
- Nadiroh. (2020). *MERDEKA BELAJAR Dalam Mencapai Indonesia Maju 2045*. UNJ Press.
- Pradana, M. A. (2025). *Pendidikan Tidak Merdeka: Krisis Pendidikan di Indonesia*. Wawasan Ilmu.
- Pratiwi, H., Ismail, M., & Riwarda, A. (2024). Questioning inclusive city quality: Teachers' perspectives and experiences in sexuality education for children with special needs in Indonesia. *International Journal of Educational Research*, 127. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102419>
- Resi, P. W. M., Bonaso, Purba, A. A., & Leatemia, A. C. (2024). *Orientasi Psikologi Pendidikan*. Widina Bhakti Persada.
- Said, R. (2025). *Kualitas Sistem Pendidikan Dasar*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Smith, A., & Sya'diyah, Z. (2024). *Pengembangan dan Problematika Pendidikan di Wilayah Kepulauan*. Deepublish.
- Suryaningrum, S. (2023). Penguatan Kapasitas Guru Pada Implementasi Kurikulum Merdeka Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). *Wahana Dedikasi*, 6(1), 165–172. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/11488>
- Suryaningrum, S. (2024). *Ilmu Pendidikan*. CV Rey Media Grafika.
- Tutukansa, A. F., Tuffahati, E. D., Studi, P., Internasional, H., Indonesia, U. I., Papua, P., Manusia, S. D., Province, P., & Resources, H. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3t Di Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa. *Jurnal Khazanah*, 14(2), 84–92.
- Ulfa, M. (2023a). Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i1.13>
- Ulfa, M. (2023b). Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i1.12>
- Vega, A., Vanezha, I., Agustia, J., Rizqi, M., & Uzdah, R. (2024). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2), 44–57.

- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Putra Dinata, Z., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18–22. <https://doi.org/10.69966/mjemias.v1i1.3>
- Widiasanti, I., Zahra, S., Sholikha, A. N., Waluny, A., & Nazhelya Najva, M. A. (2023). Pemanfaatan Big Data dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama Pandemi pada Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 398–410. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2391>
- Wijayati, I. W., Hotman, F., Damanik, S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(3), 2809–0543.
- Yudha Maya Septiana, Solfema Solfema, & Lili Dasa Putri. (2024). Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 162–169. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1446>